



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN



**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN TULIS
MASA DEPAN INVESTASI
KABUPATEN BATANG**



SEKAPUR SIRIH

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diharapkan dapat menyederhanakan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses, dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya peraturan ini, penyelesaian RDTR menjadi sangat signifikan dalam membantu realisasi investasi karena bisa mempersingkat waktu izin pemanfaatan lahan.

Kabupaten Batang, merupakan salah satu kabupaten dengan potensi peluang investasi yang besar, sehingga diperlukan arahan detail terkait tata ruang agar realisasi investasi sesuai dengan daya dukung kawasan. Dari hasil kajian awal dan penyepakatan, terpilih Perkotaan Tulis yang menjadi kawasan perencanaan dalam penyusunan RDTR di Kabupaten Batang.

Buku ini merupakan ringkasan dari materi teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Tulis Kabupaten Batang, dengan harapan dapat menjadi media promosi dan sosialisasi agar pelaksanaan investasi di Kabupaten Batang sesuai dengan arahan tata ruang yang sudah disusun.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat oleh semua stakeholder terkait, sehingga "Tata Ruang Pintu Masuk Terbaik bagi Investasi Menuju Negeri Adil, Makmur, dan Sejahtera" dapat terwujud.

Jakarta, Desember 2019

Dr. Ir. Abdul Kamarzuki M.P.M
Direktur Jenderal Tata Ruang

KATA SAMBUTAN

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan bagian penting dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam mempercepat investasi.

Pasalnya, izin lokasi dapat langsung diterbitkan pada daerah yang telah memiliki RDTR. Oleh karena itu, dengan adanya RDTR BWP Tulis diharapkan dapat mempercepat investasi di Kabupaten Batang pada umumnya dan Perkotaan Tulis pada khususnya. Buku Ringkasan RDTR dan PZ BWP Tulis ini memuat materi terkait dengan gambaran umum penyusunan, gambaran umum wilayah, analisis pengembangan wilayah, Rencana detail tata ruang, Peraturan zonasi dan penutup.

Dengan adanya buku ringkasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengembangan Perkotaan Tulis hingga 20 tahun ke depan, serta peluang-peluang investasi yang dapat dikembangkan. Hadirnya RDTR menjadi salah satu payung hukum yang penting dalam pembangunan wilayah pada masa depan. Selain untuk memberikan kepastian dalam rangka investasi tetapi dengan penyusunan RDTR yang matang, segala potensi kerusakan akibat bencana pun dapat dipetakan sehingga dampak yang dirasakan akan seminimal mungkin.

Akhir kata, terima kasih untuk semua yang membantu dalam proses penyusunan Buku ini, dan semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kemajuan Perkotaan Tulis ke depan.

Jakarta, Desember 2019

Salam Hangat,

Ir. Sufrijadi, MA
Direktur Penataan Kawasan



DAFTAR ISI

01 PENDAHULUAN

Latar Belakang
Delineasi Wilayah Perencanaan
Tinjauan Kebijakan

02 KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN

Penggunaan Lahan
Status Kepemilikan Lahan
Kerawanan Bencana
Kemampuan dan Kesesuaian Lahan
Kondisi Perekonomian
Sarana dan Prasarana

03 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TULIS

Konsep Pengembangan
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
Pembagian SBWP dan Blok Perencanaan
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
SBWP yan diprioritaskan penanganannya

04 PERATURAN ZONASI

Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
Fungsi dan Manfaat Peraturan Zonasi
Tabel ITBX

05 PENUTUP

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN TULIS
MASA DEPAN INVESTASI
KABUPATEN BATANG**

Tim Pengarah

Ir. Sufrijadi, MA.
Budi Santosa, ST., MT.

Tim Supervisi

DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN

Cut Myra Sukmawati S.T.,MSE.
Dessy Kurnia S.T.
Novi Sulistyaningsih, ST. M.Sc.
Dian Rizki Eko Priyani S Kom.
Andika Pradana S.Si
Sulistyaningrum Noviani, S.PWK

Copyright @2019

*Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dipersilahkan mengutip atau memperbanyak
sebagian buku ini dengan seizintertulis dari
penulis dan/atau penerbit*

**Dengan Dukungan Pemerintah
Kabupaten Batang**

Tim Penyusun

Eri Radiansyah, ST.
Dr. Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT
Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si
Agus Sudrajad, ST.
Natar Yudho Permono, ST.
Primus Aryunto, ST., MT
Prilly EsterinaD. Saudale, ST., MT
Melki Ruben Donuisang, ST
Ferry Chusni Arfiyanto, ST
Lisa Pratiwi Roudlatul M, ST

Dicetak di Indonesia, Diterbitkan Oleh

Direktorat Jenderal Tata Ruang,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Jalan Raden Patah 1 No.1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12110



Selamat Datang

KABUPATEN BATANG

guyub rukun

Sumber : Survey Lapangan 2019

1.

PENDAHULUAN

*Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Penataan Kawasan*



LATAR BELAKANG

Untuk mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia, Pemerintah pada tanggal 21 Juni 2018 telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses, dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Bagi daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), investor atau pelaku usaha diwajibkan mengajukan Izin Lokasi melalui Sistem OSS. Sedangkan bagi wilayah yang telah memiliki RDTR atau berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), tidak memerlukan Izin Lokasi dalam melakukan kegiatan berusaha. Oleh karena itu, penyelesaian RDTR menjadi sangat signifikan dalam membantu realisasi investasi karena bisa mempersingkat waktu izin pemanfaatan lahan..

Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN akan mempercepat penyusunan RDTR sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang dengan mengutamakan kabupaten dan kota tujuan investasi dalam mendukung kemudahan berusaha melalui pelaksanaan perizinan investasi terpadu secara daring atau OSS. Salah satu kabupaten/kota yang akan disusun rencana rinci tata ruangnya adalah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : Survey Lapangan 2019



Sumber : Survey Lapangan 2019



Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana ini adalah sinkronisasi dengan peraturan di atasnya, salah satunya adalah RTRW Kabupaten Batang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, Tujuan Penataan ruang

Kabupaten Batang adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi khususnya bidang industri yang bertumpu pada sektor pertanian dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

MAKSUD DAN TUJUAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI BWP TULIS

Maksud

Kegiatan Penyusunan Materi Teknis RDTR dan PZ BWP Tulis Kabupaten Batang ini dimaksudkan untuk menyiapkan bahan untuk menjadi landasan spasial pembangunan melalui penyusunan RDTR dan PZ sebagai dasar pemberian izin dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang

Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari Penyusunan Materi Teknis RDTR dan PZ BWP Tulis Kabupaten Batang adalah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam penyusunan materi teknis RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : Survey Lapangan 2019

DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN

Lingkup wilayah dari pekerjaan Penyusunan Materi Teknis RDTR Kabupaten Batang adalah wilayah perkotaan pada kecamatan di Kabupaten Batang. Lingkup wilayah penyusunan RDTR ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Batang terletak antara 60 51' 46" dan 70 11' 47" Lintang Selatan dan antara 1090 40' 19" dan 1100 03' 06" Bujur Timur. Letak Kabupaten Batang berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa. Batas Administrasi Kabupaten Batang membentang dari wilayah pantai hingga dataran tinggi mendekati wilayah Dieng

1. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan
2. sebelah selatan dengan Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara
3. sebelah timur dengan Kab. Kendal
4. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
5. Kabupaten Batang terbagi menjadi 15 kecamatan. Luas wilayah Kab. Batang tercatat 78.864,16 Ha.



Positioning Kawasan



Perlu diingat merekomendasikan wilayah Kabupaten Batang, pada jalur rencana jalan tol adalah zona. Area transportasi dan utilitas yang tinggi di jalan tol akan memudahkan pembangunan berkeadilan sebagai prasyarat di sektor jasa rumah dan transportasi.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Batang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Wonotunggal	5.235,27	6,64
2	Bandar	7.332,80	9,30
3	Blado	7.838,92	9,94
4	Reban	4.633,38	5,88
5	Bawang	7.384,51	9,36
6	Tersono	4.932,98	6,26
7	Grising	7.276,64	9,23
8	Limpung	3.341,66	4,24
9	Banyuputih	4.442,50	5,63
10	Subah	8.352,17	10,59
11	Pecalungan	3.618,97	4,59
12	Tulis	4.508,78	5,72
13	Kandeman	4.175,67	5,29
14	Batang	3.434,54	4,36
15	Warungasem	2.355,37	2,99
Jumlah		78.864,16	100

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka 2018

Adapun kriteria yang ditentukan untuk penetapan delineasi kawasan BWP, yaitu:

1. Kesesuaian dengan RTRW
 - Ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi
 - Bercirikan perkotaan
2. Bernilai investasi tinggi Adanya kebijakan khusus pemerintah Pusat dan/atau daerah untuk prioritas pengembangan ekonomi
 - Arahan Presiden
 - Tercantum dalam Peraturan Presiden atau INPRES
 - Tercantum dalam RPJMN/RP-



Peta 1.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Batang



Peta 1.2 BWP Tulis Kabupaten Batang

JMD/RTRW Nasional/RTRW Provinsi

3. Terintegrasi dengan infrastruktur, seperti dekat dengan akses transportasi, ada jaminan jaringan telekomunikasi, dan jaminan sumber dan air baku
4. Ketersediaan lahan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta status lahan tidak bermasalah
5. Luasan, yaitu memiliki luas area terbangun sekitar 1.500-2.000 Ha.



Setelah dilakukan analisa penentuan wilayah perencanaan dan dilakukan kesepakatan

Maka terpilih Kecamatan Tulis sebagai lokus dalam kegiatan ini. Berdasarkan beberapa langkah analisa yang dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana pengembangan kawasan industri berlokasi di Desa Kenconorejo.
2. Terdapat beberapa lokasi persebaran industri yang berlokasi di Desa Wringingitung, Desa Kedungsegog, Desa Kaliboyo, Desa Simbangjati, Desa Tulis, Desa Simbangdesa, Desa Posong, Desa Jrahapayung, dan Desa Beji.

3. Berdasarkan analisa skalogram terdapat beberapa desa yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan, yaitu Desa Simbangdesa, Desa Tulis, Desa Beji, Desa Kenconorejo, Desa Ponowareng, dan Desa Jrahapayung. Desa-desa yang menjadi pertimbangan ini diukur berdasarkan kriteria dan indikator penentuan delineasi BWP, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pengukuran terhadap Penentuan Delineasi Wilayah

No	Kriteria	Indikator	Keterangan
1	Sesuai dengan RTRW	Bercirikan Perkotaan	Sesuai
2	Bernilai Investasi Tinggi	Nilai investasi 90% dari nilai investasi Kabupaten Batang	Hampir sesuai
3	Kebijakan Khusus untuk prioritas pengembangan ekonomi	Kebijakan kepala daerah untuk pengembangan wilayah	Sesuai
		Terdapat masterplan/kajian terkait pengembangan ekonomi	Sesuai
4	Terintegrasi dengan Infrastruktur	Berada/dekat dengan jalan nasional, pelabuhan, stasiun, exit toll	Sesuai
		Berada/dekat dengan infrastruktur air bersih	Sesuai
		Berada/dekat dengan infrastruktur listrik	Sesuai
		Berada/dekat dengan infrastruktur telekomunikasi	Sesuai
		Berada/dekat dengan sumber air baku	Sesuai
5	Ketersediaan lahan	Kondisi fisik terkait daya dukung dan daya tampung	Data belum tersedia
6	Luasan	Memiliki luas area terbangun 1.500-2.000 Ha	Dimungkinkan adanya pengembangan kawasan industri di lahan belum terbangun

Sumber : Hasil Analisa, 2019

Setelah dilakukan analisa penentuan wilayah perencanaan dan dilakukan kesepakatan maka terpilih BWP Kecamatan Tulis sebagai lokus dalam kegiatan ini. Kecamatan Tulis mempunyai luas keseluruhan 4.508,78 Ha yang terbagi dalam 17 desa. Dalam penentuan deliniasi ditetapkan 14 desa sebagai bagian wilayah perencanaan (BWP) yang terbagi berdasarkan batas fisik dan batas fungsional. Luas BWP Tulis ialah 3.119,90 Ha, dimana BWP Tulis direncanakan cenderung ke

arah selatan, tepatnya terletak diantara jalur tol Semarang-Batang dan ruas jalan arteri primer Jl. Raya Subah. Selain itu, pada Desa Kenconorejo direncanakan sebagai kawasan industri, yang terletak tepat dekat jalan Tol Semarang-Batang. Lebih jelasnya terkait perbandingan antara luas awal Kecamatan Tulis dengan luasan BWP Tulis, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Wilayah administrasi BWP Tulis dapat dilihat pada Tabel dan Peta berikut.

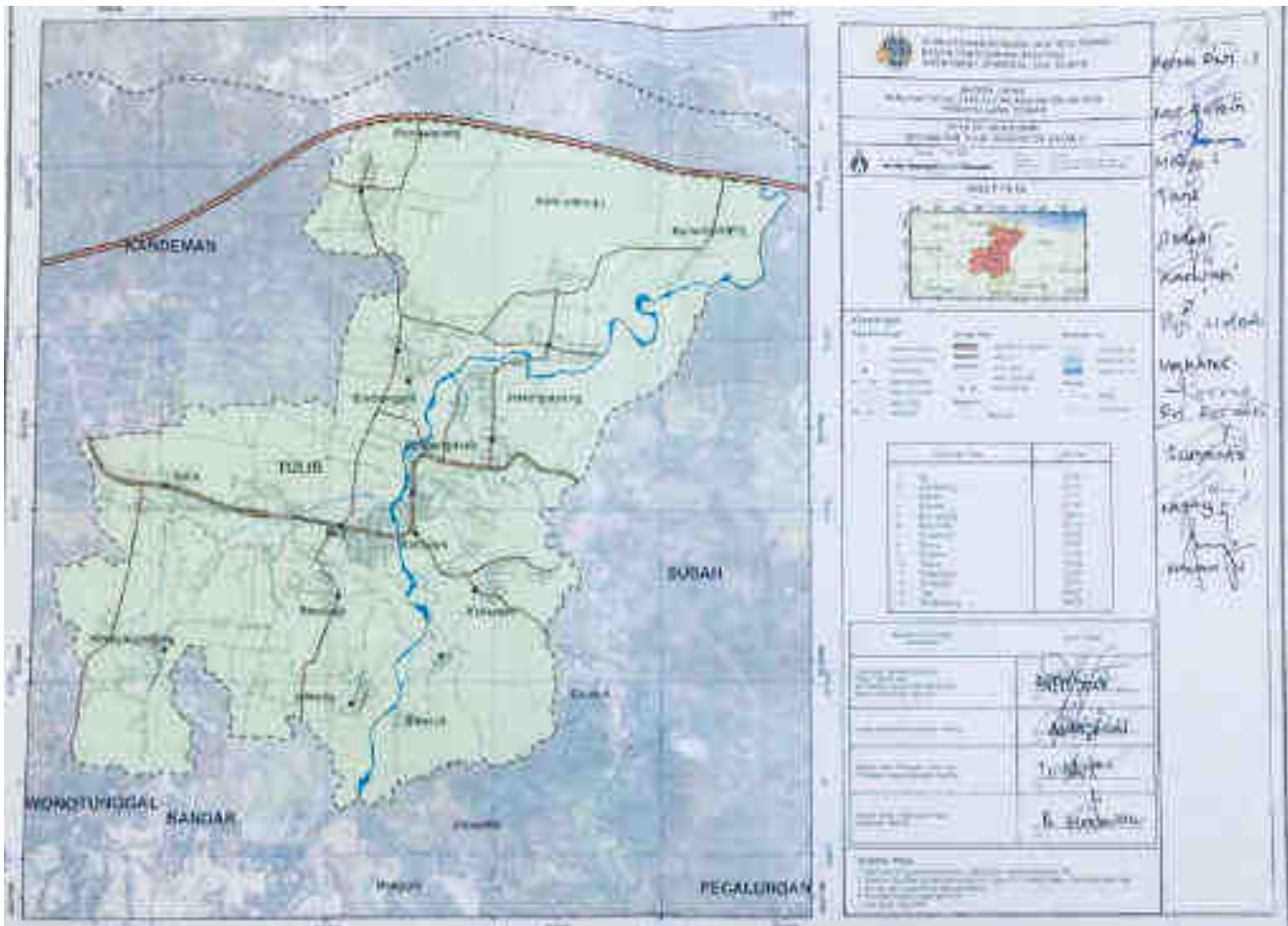
Tabel 1.3 Luas BWP Tulis Kabupaten Batang

No	Desa	Luas Desa (Ha)	Luas Wilayah Terdeliniasi (Ha)
1	Tulis	336,57	336,57
2	Wringingintung	385,10	385,10
3	Posong	201,61	201,61
4	Sembojo	12,69	122,69
5	Beji	120,06	120,06
6	Kaliboyo	71,73	71,73
7	Simbangdesa	62,69	62,69
8	Simbangjati	139,75	139,75
9	Ponowareng	185,93	185,93
10	Kenconorejo	706	491,58
11	Kedungsegog	259,55	259,55
12	Siberuk	138,34	138,34
13	Kebumen	276,79	276,79
14	Jrakahpayung	327,50	327,50
Jumlah		3.334,32	3.119,90

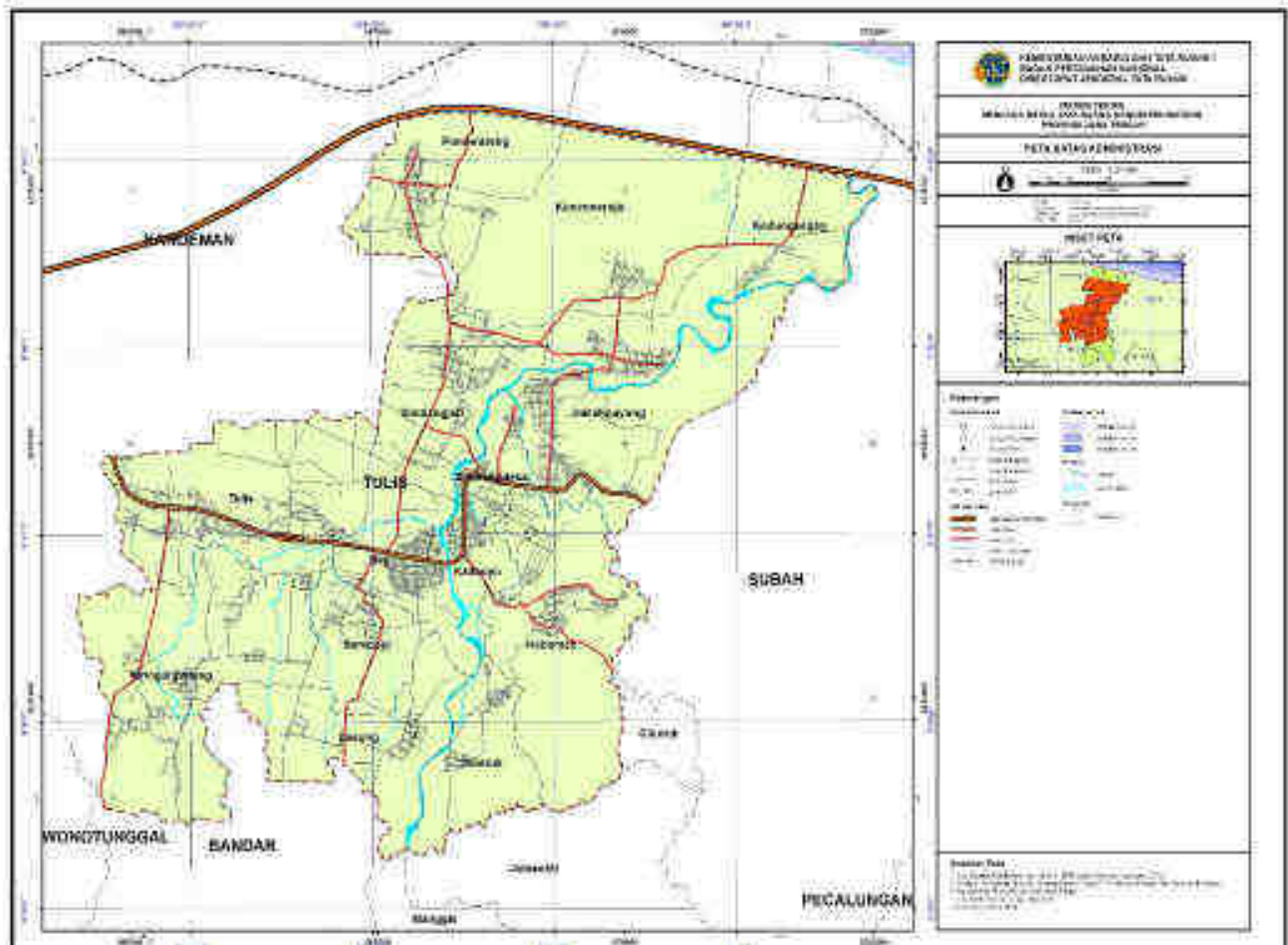
Sumber: Hasil Kesepakatan Deliniasi BWP, 2019



Gambar 1.1 Dokumentasi Penandatanganan Kesepakatan Deliniasi Berita Acara RDTR dan KLHS Kabupaten Batang, serta Kesepakatan Delineasi BWP Perkotaan Tulis



Gambar 1.2 Kesepakatan Delineasi BWP Tulis



Peta 1.2 Batas Administrasi BWP Tulis



Sumber : Survey Lapangan 2019

TINJAUAN KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil overview kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Batang, maka sinkronisasi kebijakan terkait dengan Penyusunan RDTR dan PZ BWP Tulis maka kesimpulan kebijakan terkait rencana tata ruang dan pengembangan di BWP Tulis meliputi:

Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang di Kecamatan Tulis meliputi:

1. Rencana sistem pusat pelayanan, yang terdiri atas:
 - » Pengembangan PPK di perkotaan Tulis
 - » Sistem perwilayahan, termasuk dalam SWP Subah dengan pusat pengembangan di Perkotaan Subah yang meliputi Kec. Subah dan Kec. Tulis. Arah pengembangan untuk industry, pertanian, peternakan, pertambangan, perdagangan dan jasa, kehutanan, transit perjalanan dan pariwisata
2. Sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
 - » Pengembangan jalan tol Pemalang-Batang dan tol Batang-Semarang
 - » Pengembangan terminal tipe C
 - » Jalur kereta yang menghubungkan Kec. Batang-Tulis-Subah-Gringsing
 - » Pengembangan jalur kereta api kawasan industri
3. Energi dan Kelistrikan, pembangunan gardu induk tegangan ekstra tinggi di Kecamatan Tulis

Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang di Kecamatan Tulis meliputi:

1. Kawasan lindung, terdiri atas:
 - » Kawasan perlindungan setempat di Kecamatan Tulis diarahkan ke kawasan sempadan sungai, terutama di sepanjang Sungai Kaliboyo
 - » Kawasan rawan bencana, terutama kawasan rawan bencana kebakaran hutan
2. Rencana peruntukan kawasan budidaya di Kecamatan Tulis, terdiri atas:
 - » Kawasan hutan produksi seluas 145 Ha
 - » Kawasan tanaman pangan seluas 1.816 Ha yang meliputi:
 - LP2B seluas 970 Ha
 - LCP2B seluas 846 Ha
 - » Pertanian hortikultura seluas 212 Ha
 - » Kawasan perkebunan seluas 57 Ha
 - » Kawasan peruntukan industry seluas 966 H
 - » Kawasan peruntukan permukiman, meliputi:
 - Permukiman perkotaan seluas 492 Ha
 - Permukiman perdesaan seluas 508 Ha

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN TULIS
MASA DEPAN INVESTASI
KABUPATEN BATANG

2.

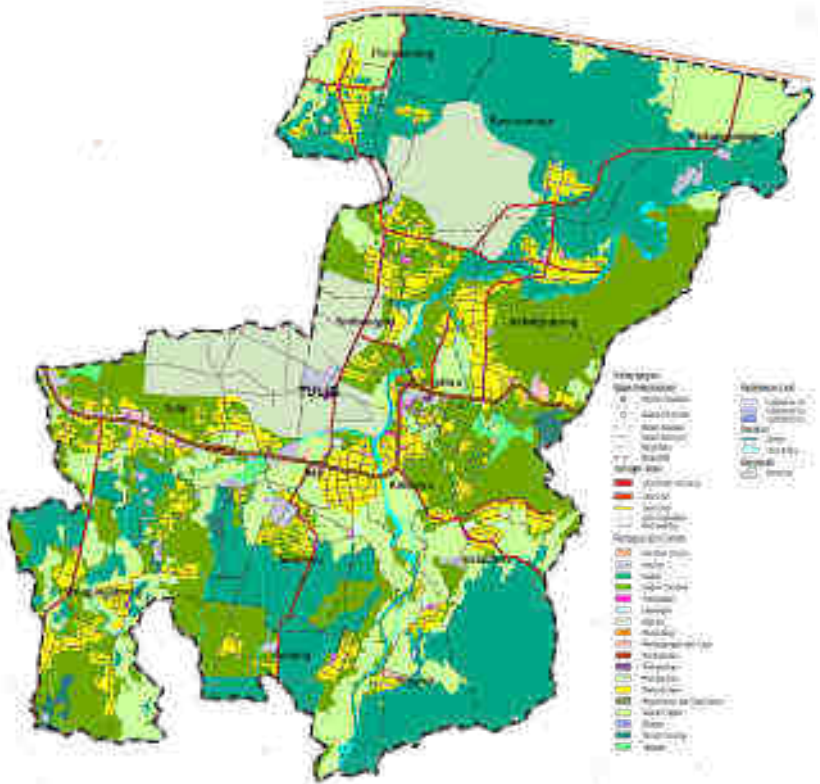
KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN

*Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Penataan Kawasan*



PENGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu untuk peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan di Kecamatan Tulis sebagian besar adalah untuk peruntukan kawasan budidaya. Dominasi penggunaan lahan di BWP Tulis adalah lahan tak terbangun dengan penggunaan lahan terbesar ialah kebun campur seluas 936,7 ha. Untuk lahan terbangun, penggunaan lahan terbesar ialah untuk kawasan permukiman seluas 93,8 ha.



Peta 2. 1 Penggunaan Lahan di BWP Tulis

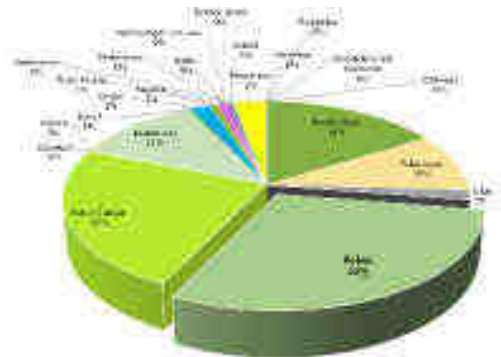


Diagram 2. 1 Diagram Persentase Penggunaan Lahan di BWP Tulis

Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Eksisting BWP Tulis

No	Desa	Penggunaan Lahan																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Tulis	37,32	44,47	10,88	7,72	86,16	0	0,2	119,16	0	2,51	1,08	8,5	0,1	0	3,72	2,71	0,19	11,39	0,06	0,4	0	0
2	Wringingin	67	38,92	4,79	91,37	141,98	0	0	0	11,32	4,98	12,21	0	0,07	0	0,1	3,64	0,15	8,41	0,01	0,15	0	0
3	Posong	31,52	12	2,17	64,1	84,75	0	0	0	0	4,71	0	0	0,01	0	0,05	0,27	0,08	1,87	0,01	0,07	0	0
4	Sembojo	22,11	14,21	2,39	60,27	15,91	0	0	0	0	1,78	0	0	0,01	0	0,15	2,18	0,05	3,53	0	0,11	0	0
5	Beji	44,91	18,51	4,11	0,1	6,45	1,04	0,78	27,74	0	3,54	0	0,11	0,53	0	1,27	1,77	0,19	8,76	0,02	0,22	0	0
6	Kaliboyo	22,31	13,21	2,35	0	20,59	0	0,37	0	0	6,6	0	0	0,12	0	0,31	0,15	0,06	5,29	0,13	0,24	0	0
7	Simbangde	13,41	15,12	3,11	0	18,19	0	0,73	0	0	4,53	0	0	0,17	0	0,85	0,31	0,15	5,42	0,06	0,59	0	0
8	Simbangjat	8,71	21,07	2,78	7,95	36,92	0	0	54,32	0	3,49	0	0	0,07	0	0,11	0,24	0,08	3,87	0	0,16	0	0
9	Ponowaren	50,52	17,23	2,41	107,17	0	0	0,58	0	0	0	0	0	0,06	0	0,49	0,03	0,08	7,16	0,03	0,16	0	0
10	Kenconorej	22,57	25,38	3,63	249,89	39,2	0,22	0,36	136,43	3,23	0,53	0	0	0,07	0	0,55	0,25	0,14	8,65	0,07	0,42	0	0,02
11	Kedungseg	77,25	15,05	2,8	130,11	0	0,34	0,42	10,45	0	11,49	0,07	0	0,04	0,02	0,33	5,2	0,05	5,86	0	0,08	0	0
12	Siberuk	37,31	7,44	1,42	78,39	5,84	0,66	0,16	0	0	3,96	0	0	0,04	0	0,01	0,13	0,12	2,75	0,02	0,09	0	0
13	Kebumen	55,22	21,56	3,66	135,88	90,46	0,88	0,41	0	0	2,03	0,67	9,67	0,05	0	0,17	0,21	0,04	6,46	0,03	0,11	0,02	0
14	Jrakahpayu	17,5	33,36	4,71	0,56	191,46	0	0	0	0	9,53	7,29	0,12	0,05	0	1,07	0,24	0,13	10,5	0,09	0,19	0	0,04
	Jumlah	507,66	297,53	51,22	933,51	737,9	3,14	4,02	348,11	14,55	59,66	21,33	18,39	1,39	0,02	9,17	17,32	1,51	89,92	0,52	2,98	0,02	0,05

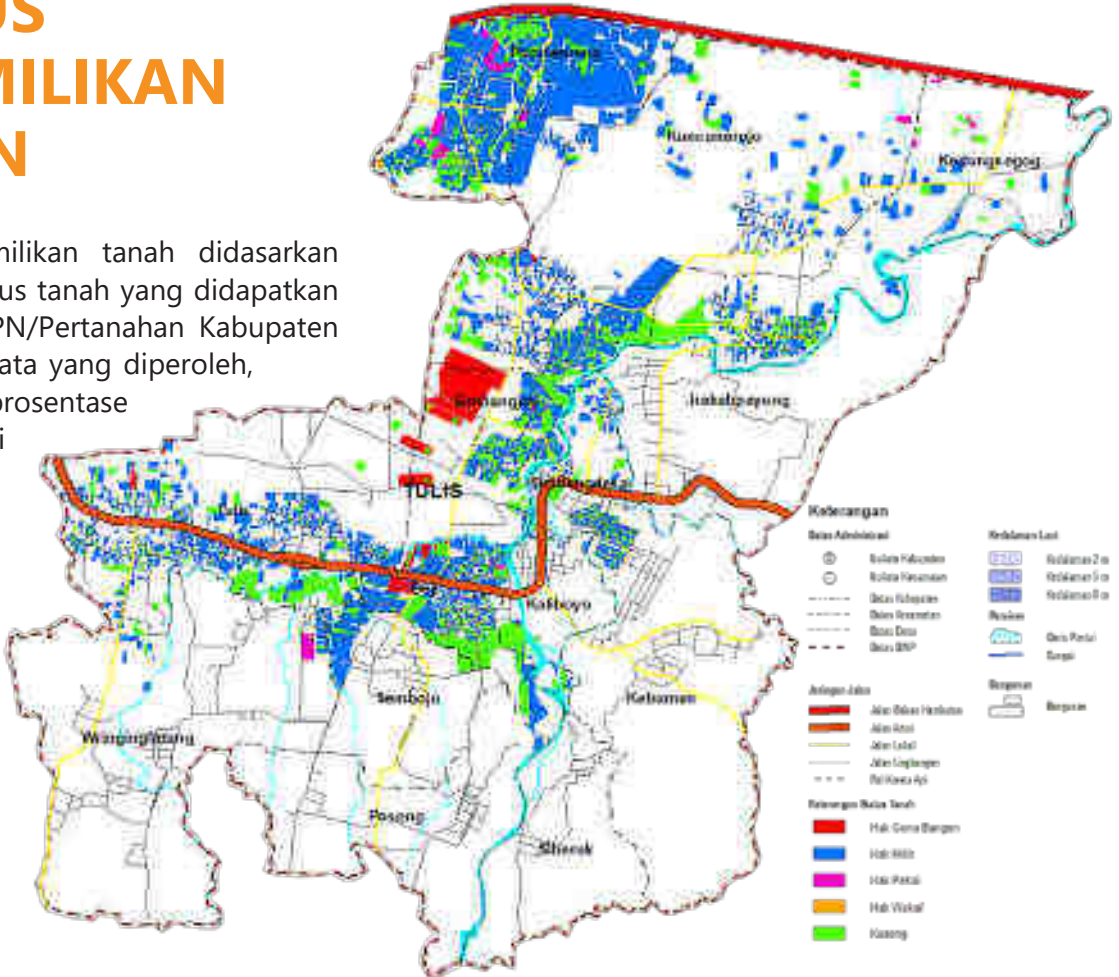
Sumber : Hasil Digitasi GIS, 2019

Keterangan :

- | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Sawah irigasi | 6. Lapangan | 13. Perkantoran | 20. Pendidikan |
| 2. Pekarangan | 7. Makam | 14. Fasilitas Sosial | 21. Olahraga |
| 3. Jalan | 8. Perkebunan | 15. Perdagangan dan Jasa | 22. Pertahanan dan Keamanan |
| 4. Kebun | 9. Sawah | 16. Industri | |
| 5. Kebun campuran | 10. Sungai | 17. Peribadatan | |
| | 11. Tanah Kosong | 18. Permukiman | |
| | 12. Tegalan | 19. Kesehatan | |

STATUS KEPEMILIKAN LAHAN

Analisa kepemilikan tanah didasarkan pada peta status tanah yang didapatkan dari Kantor BPN/Pertanahan Kabupaten Batang. Dari data yang diperoleh, didapatkan prosentase s e b a g a i berikut:



Peta 2.2 Status Kepemilikan Lahan



Tabel 2.1 Sebaran Penggunaan Lahan Eksisting Berdasarkan Status Kepemilikan Tanah

Penggunaan Lahan	Status Tanah					Total (ha)
	Hak Guna Bangun	Hak Milik	Hak Pakai	Hak Wakaf	Kosong	
Bangunan Industri	0,141	2,724	-	-	0,160	3,026
Bangunan Kesehatan	-	0,093	-	-	0,001	0,094
Bangunan Pendidikan	-	0,313	0,153	0,054	0,210	0,730
Bangunan Perdagangan dan Jasa	0,008	3,009	0,003	-	0,480	3,500
Bangunan Peribadatan	-	0,156	-	0,071	0,104	0,331
Bangunan Perkantoran	0,020	0,153	-	-	0,259	0,432
Bangunan Permukiman	0,028	26,163	0,020	0,060	6,986	33,257
Bangunan Pertahanan dan Keamanan	-	0,015	-	-	-	0,015
Bangunan Sosial	-	0,006	-	-	0,003	0,010
Jalan	0,231	2,703	0,064	0,007	0,818	3,822
Kebun	0,152	111,428	2,647	0,320	31,692	146,238
Kebun Campur	0,706	62,913	-	0,041	22,976	86,637
Lapangan	-	-	0,229	-	0,954	1,184
Makam	-	0,134	0,851	-	0,236	1,220
Pekarangan	2,720	65,032	0,265	0,239	16,009	84,264
Perkebunan	21,613	10,508	-	-	1,720	33,841
Sawah	-	0,402	-	-	0,609	1,012
Sawah Irigasi	4,804	76,195	10,875	-	44,860	136,734
Sungai	-	0,899	-	-	0,638	1,537
Tanah Kosong	-	-	0,111	-	-	0,111
Tegalan	0,003	1,124	-	-	2,448	3,575
Total (ha)	30,426	363,970	15,217	0,791	131,164	541,568

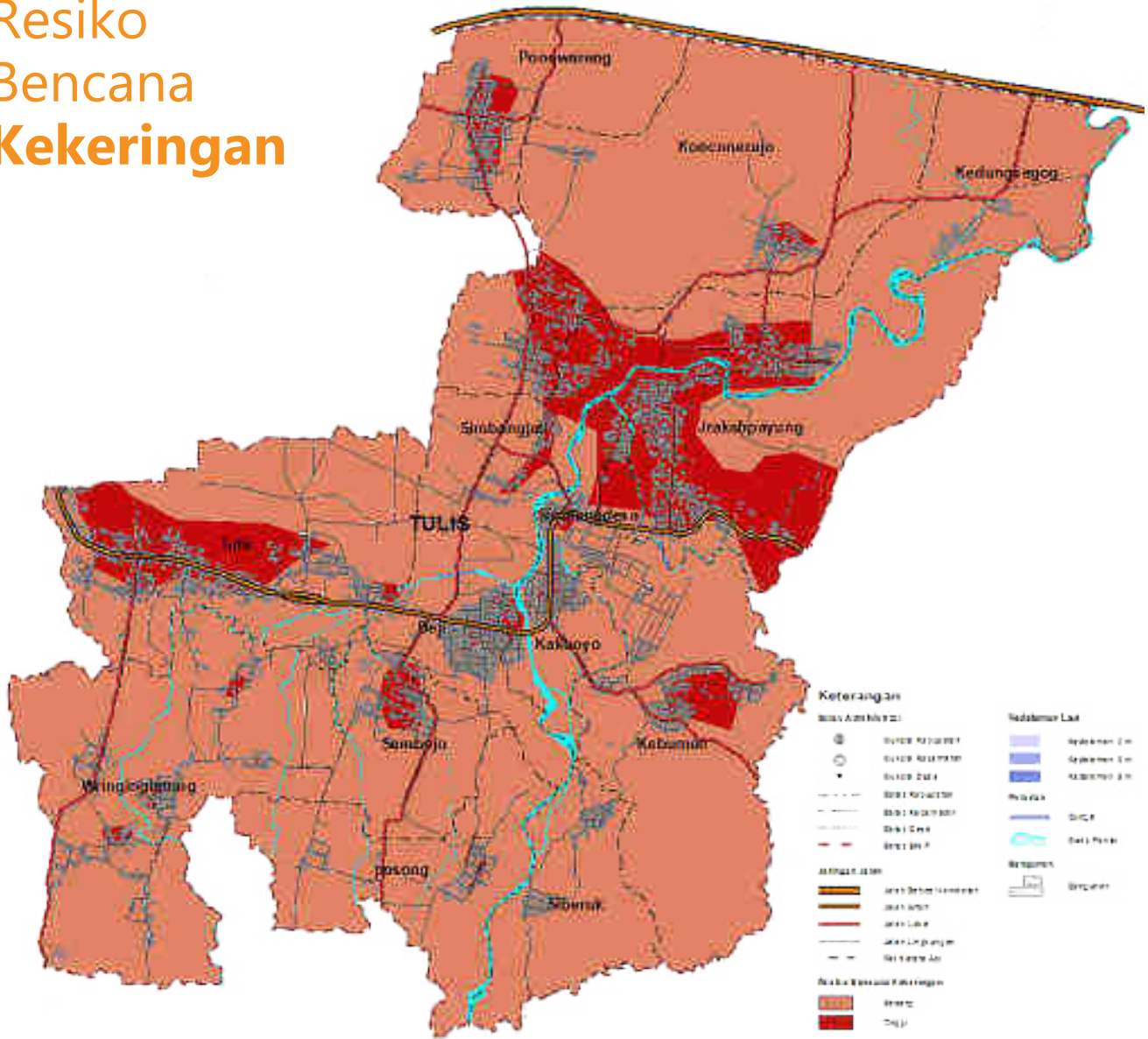
Sumber: Overlay Peta, 2019



KERAWANAN BENCANA

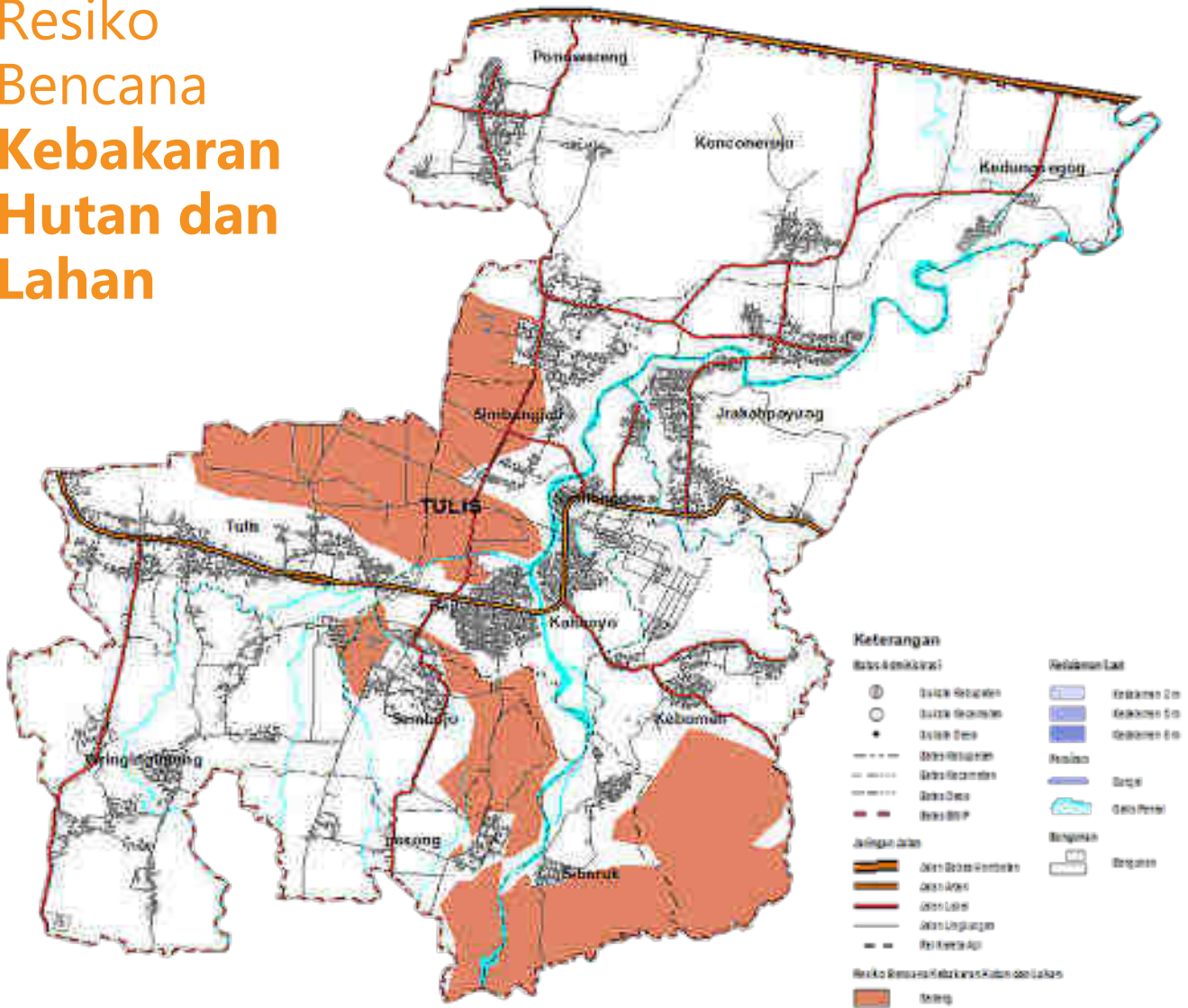
*Tahap awal dari analisa kebencanaan
adalah mengidentifikasi kerawanan
bencana di BWP Tulis.*

Resiko Bencana Kekeringan



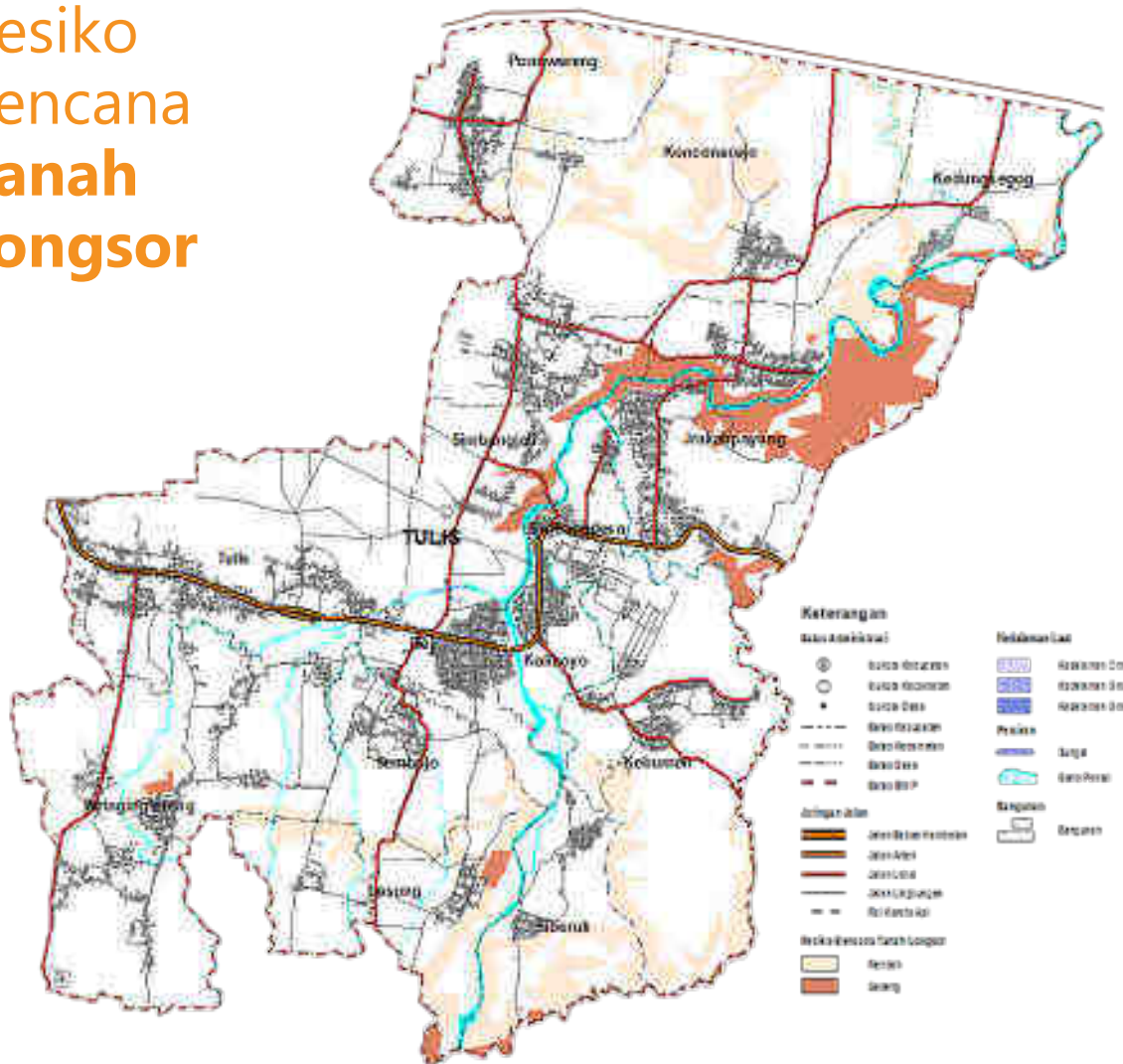
Peta 2.5 Resiko Bencana Kekeringan

Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



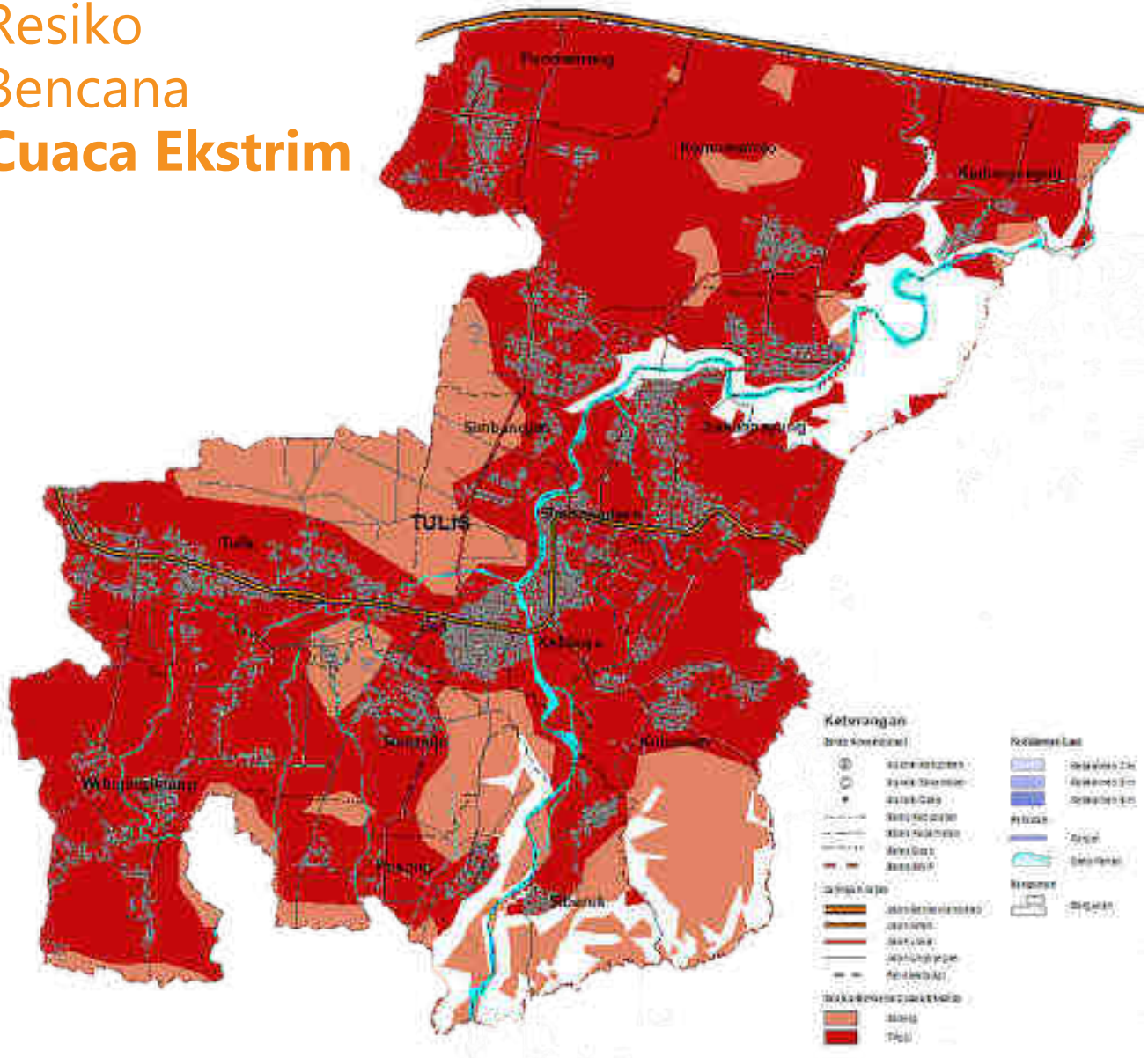
Peta 2.6 Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Resiko Bencana Tanah Longsor



Peta 2.3 Resiko Bencana Tanah Longsor

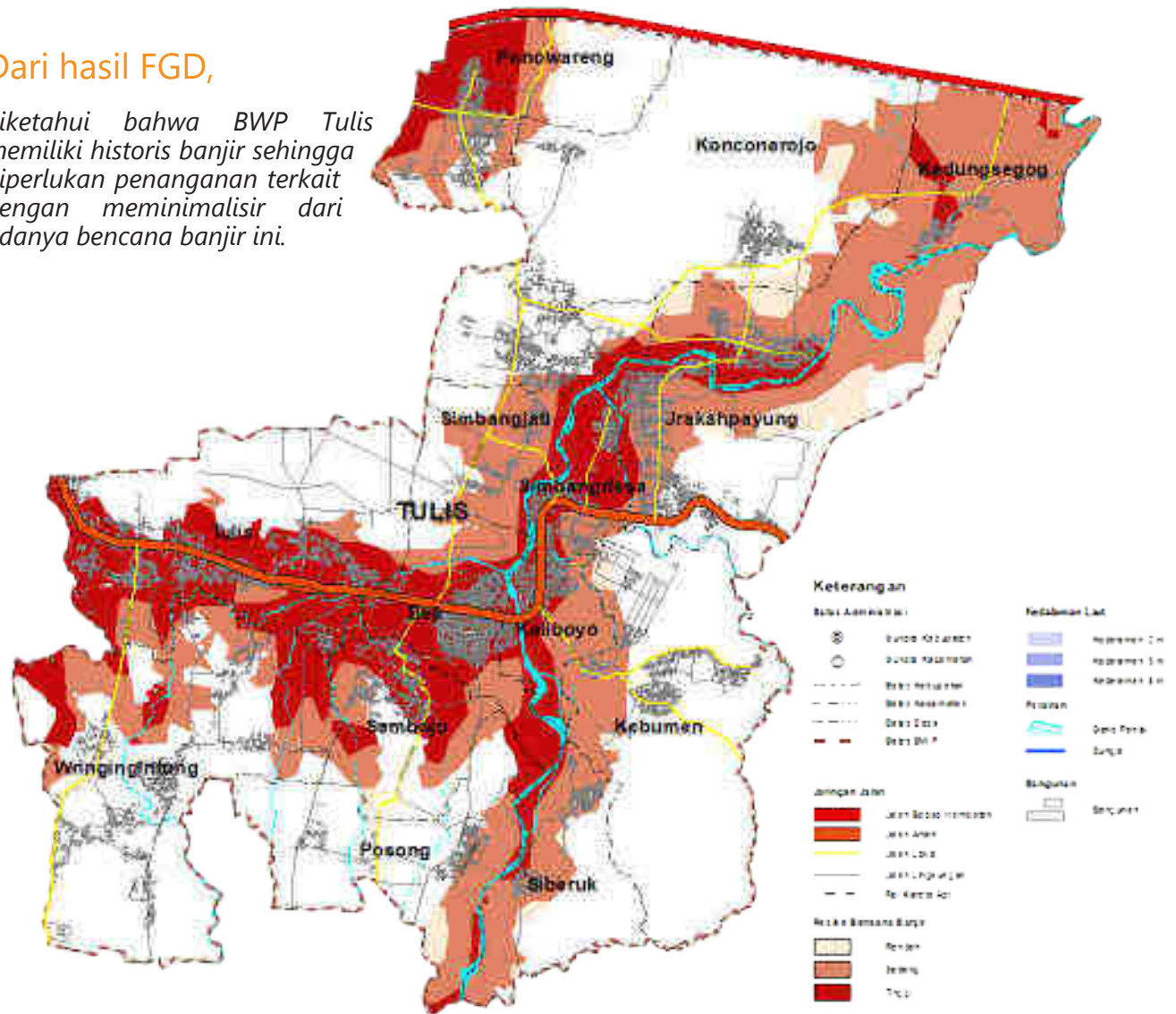
Resiko Bencana Cuaca Ekstrim



Peta 2.7 Resiko Bencana Cuaca Ekstrim

Dari hasil FGD,

diketahui bahwa BWP Tulis memiliki historis banjir sehingga diperlukan penanganan terkait dengan meminimalisir dari adanya bencana banjir ini.



Peta 2.8 Resiko Bencana Banjir



Sumber : Survey Lapangan 2019

